

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Agency Theory

Teori *agency* merupakan teori yang menggambarkan dinamika hubungan antara *principal* (pemilik) dan agen (manajemen) dalam suatu organisasi. Menurut teori agensi, pihak prinsipal yang memberikan wewenang dalam pendelegasian tanggung jawab kepada manajer sebagai pihak agen untuk melaksanakan fungsi sesuai kesepakatan dalam mengoperasikan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Namun dalam praktiknya, hubungan antara principal dan agen tidak selalu berjalan harmonis. Terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan, dimana masing-masing pihak memaksimalkan kesejahteraan kaitannya dengan kepentingan individu. Perbedaan kepentingan antara keduanya dapat menimbulkan konflik yang dikenal sebagai *agency problem* (Burhanudin & Setiawati, 2024). Selain itu, dalam hubungan ini sering terjadi *asimetri informasi*, di mana agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan principal. Hal ini memberikan kesempatan bagi agen untuk mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut, diperlukan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance (GCG) yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan *corporate governance* berlandaskan pada teori *agency* yang menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam hal ini, manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan

keuntungan pemilik (principal) dan sebagai imbalannya, memperoleh kompensasi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (Lestari & Zulaikha, 2021).

2.1.2. Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen adalah suatu sistem yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak internal perusahaan guna membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan (Aripin & Negara, 2021:3).

Menurut Savitri & Andreas (2023 :133) akuntansi manajemen adalah proses pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun nonkeuangan, untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Manajer menggunakan informasi dari akuntansi manajemen untuk berbagai keperluan, seperti mengembangkan, mengkomunikasikan, dan menerapkan strategi, mengkoordinasikan keputusan tentang desain produk, produksi, dan pemasaran, serta mengevaluasi kinerja perusahaan.

2.1.3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab sosial (Irwondy & Hubeis, 2016).

Melalui penerapan *good corporate governance*, dewan dan manajemen didorong untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan yang efektif ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga menciptakan persaingan bisnis yang sehat dan lingkungan usaha yang kondusif. Pada akhirnya, penerapan *good corporate*

governance yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan (Prihati & Khabibah, 2022).

Indeks CGPI menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi biaya yang timbul akibat konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, sehingga menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat finansial yang signifikan (Mayangsari & Andayani, 2015).

Agar *good corporate governance* dapat terimplementasi secara efektif, perusahaan perlu berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Zarkasyi, (2008); Andypratama & Mustamu, (2013) prinsip *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Perusahaan yang transparan secara proaktif menyediakan informasi penting dan akurat kepada semua pemangku kepentingan. Informasi ini disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan diakses. Selain memenuhi persyaratan hukum, perusahaan juga mengungkapkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Transparansi dapat dinilai dari keterbukaan informasi perusahaan dan kebijakan yang mendukung transparansi.

2. *Accountabililty* (Akuntabilitas)

Perusahaan yang akuntabel dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya. Perusahaan dikelola secara baik, terukur dan sejalan dengan

kepentingan semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas adalah kunci keberlanjutan perusahaan, kinerja perusahaan dan sistem audit internal menjadi indikator utama akuntabilitas.

3. *Responsibility* (Pertanggung Jawaban)

Perusahaan yang bertanggung jawab mematuhi hukum dan regulasi, serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Komitmen terhadap tanggung jawab sosial (CSR) dan kepatuhan terhadap hukum menjadi bukti tanggung jawab perusahaan.

4. *Independensi* (Kemandirian)

Perusahaan yang independen memiliki struktur organisasi yang jelas dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Setiap organ perusahaan menjalankan fungsinya secara mandiri dan tidak saling memanipulasi. Kemerdekaan perusahaan dapat dilihat dari sejauh mana pengaruh internal dan eksternal terhadap pengambilan keputusan.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Perusahaan yang adil memperlakukan semua pemangku kepentingan secara setara dan wajar. Kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dipertimbangkan secara seimbang dalam pengambilan keputusan. Keadilan dapat dinilai dari bagaimana perusahaan memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Maureen & Indah dalam Klaudia *et al.*, (2022) struktur kepemilikan dan komite audit merupakan dua mekanisme penting dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini seharusnya

mencakup keduanya. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, fungsi komite audit terbatas. Budiningsih *et al.*, (2022) menyebut bahwa komite audit hanya menjalankan tugas yang ditetapkan oleh dewan komisaris, seperti mengevaluasi auditor eksternal dan menangani investigasi tertentu. Keterbatasan ini menjadi salah satu alasan tidak dimasukkannya komite audit sebagai variabel dalam penelitian.

Selain itu, secara teknis data komite audit pada seluruh sampel bersifat konstan dan tidak bervariasi, sehingga tidak layak untuk dianalisis statistik. Kondisi ini dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur jumlah minimum anggota komite audit dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. Kep-643/BL/2012 yang umumnya hanya diikuti secara normatif oleh perusahaan (Sari *et al.*, 2018). Menurut Nadjib *et al.* (2019) keberadaan komite audit sering kali hanya untuk memenuhi kewajiban regulasi, bukan karena kebutuhan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, aspek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini hanya direpresentasikan oleh dua indikator, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, yang tetap relevan untuk mencerminkan struktur pengawasan dan kontrol internal dalam perusahaan.

1. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajer dari total saham yang beredar (Santoso *et al.*, 2017). Menurut Sugiarto (2011) dalam Suparlan (2019) Kepemilikan manajerial merujuk pada situasi di mana seorang individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan juga memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Dengan memiliki saham di perusahaan, manajer akan lebih bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan mengurangi biaya yang timbul akibat konflik kepentingan, sehingga

meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan (Siregar & Pembudi, 2014). Aidha & Venusita (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan dari pihak manajemen maka dapat meminimalisasi terjadinya keadaan *financial distress* dalam perusahaan.

Menurut Feanie & Dillak (2021), kepemilikan manajerial dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{KPM} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau reksa dana (Setiawan & Syarif, 2019). Rustyaningrum & Rohman, (2021) menyatakan bahwa Kepemilikan saham oleh investor institusi dapat menjadi dorongan bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena investor institusi akan memantau dan memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya dengan baik.

Budiningsih *et al.*, (2022) mengatakan bahwa Kepemilikan institusional diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memiliki pengaruh yang signifikan

Sesuai dengan PSAK 15, investor institusi yang memiliki kurang dari 20% saham umumnya tidak memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakan keuangan atau operasional perusahaan yang mereka investasikan, artinya suara mereka dalam rapat pemegang saham tidak terlalu berpengaruh.

2. Memiliki pengaruh yang signifikan.

Sesuai PSAK 15, investor institusional dengan kepemilikan saham antara 20% hingga 50% memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasional perusahaan, artinya mereka bisa memberikan masukan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan, namun tidak memiliki kendali penuh.

3. Memiliki hak pengendali

Sesuai dengan aturan OJK Nomor 8 Tahun 2017, pengendali adalah pihak yang memiliki kepemilikan saham melebihi 50% dari total saham yang sudah disetor sepenuhnya dalam suatu perusahaan. Pengendalian yaitu kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut (PSAK 65, 2013)

Menurut Fandy & Susilowati (2021) semakin tinggi saham yang dimiliki investor institusional maka pemanfaatan aset perusahaan akan semakin efisien, sehingga kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* semakin kecil. Adapun rumus pengukuran kepemilikan institusional menurut Feanie & Dillak (2021) adalah sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.3. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan suatu entitas bisnis dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek menggunakan sumber daya yang tersedia (Febelin *et al.*, 2024). Defisit likuiditas dapat memicu berbagai permasalahan, mulai dari penjualan aset secara paksa atau bahkan menghadapi risiko kebangkrutan. Lebih jauh lagi, keterlambatan pembayaran dapat merusak hubungan dengan para

pemasok dan berdampak negatif pada kualitas produk atau layanan yang dihasilkan (Saraswati *et al.*, 2020). Manajemen likuiditas yang baik adalah kunci keberhasilan suatu perusahaan. Likuiditas yang memadai tidak hanya menjamin kelangsungan operasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Dirmansyah *et al.*, 2022).

Penelitian ini menggunakan rasio lancar (*current ratio*) sebagai tolok ukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset yang mudah dijual. Pemilihan *current ratio* didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio ini memberikan gambaran likuiditas yang lebih komprehensif karena mencakup seluruh aset lancar, termasuk persediaan, sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan secara menyeluruh dalam memanfaatkan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi rasio lancar, semakin baik kemampuan perusahaan tersebut (Feanie & Dillak, 2021). Sebuah perusahaan dianggap sehat secara *finansial* jika rasio likuiditasnya lebih dari 1 atau diatas 100%. Sebaliknya, jika rasio ini kurang dari 1 atau dibawah 100%, maka kondisi keuangan perusahaan dianggap kurang baik (Elisa, 2018).

Menurut Khairuddin *et al.*, (2019) likuiditas dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$CR = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang lancar}} \times 100\%$$

2.1.4. *Financial distress*

Financial distress adalah kondisi keuangan perusahaan yang memburuk sebelum mencapai tahap kebangkrutan (Plat dan Plat dalam Fatonah, 2016). Islamiyatun *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *Financial distress* merujuk pada kondisi di mana suatu

perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, sehingga mengancam kelangsungan usahanya. Kesulitan keuangan perusahaan bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan faktor eksternal lebih berkaitan dengan kondisi lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan (Budiningsih *et al*, 2021).

Menurut Altman (1986) dalam Patunrui dan Yati (2017); Elia & Rahayu (2021) mengklasifikasikan *financial distress* ke dalam empat kategori utama:

1. *Economic Failure* atau Kegagalan Ekonomi

Kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan.

2. *Business Failure* atau Kegagalan Bisnis

Istilah yang mencakup berbagai situasi bisnis yang tidak optimal. Ini bisa meliputi penurunan kinerja, ketidakmampuan bersaing, atau ketidakpuasan pelanggan yang signifikan.

3. *Insolvency*

Adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo karena arus kas yang tidak memadai.

4. *Legal Bankruptcy*

Tahap paling serius dari kesulitan keuangan, di mana perusahaan secara resmi dinyatakan bangkrut menurut hukum yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat *financial distress* secara lebih akurat, salah satu pendekatan yang relevan dan banyak digunakan adalah metode Altman *Z-Score*, yang mengkombinasikan berbagai rasio keuangan untuk memprediksi potensi

kebangkrutan perusahaan (Mastuti *et al.*, 2013). Menurut Prihadi (2019) perkembangan Altman *Z-Score*, yaitu:

1. Model Altman Pertama

Pada tahun 1968 Altman berhasil menemukan model prediksi kebangkrutan pertama yang dinamai Model Altman Pertama (*Z Scores*). Model ini hanya cocok digunakan untuk perusahaan manufaktur yang sahamnya sudah diperdagangkan di Bursa Efek (perusahaan *go public*). Persamaan yang dipakai dalam analisis prediksi kebangkrutan model altman pertama adalah:

$$Z = 1,2 (X1) + 1,4 (X2) + 3,3 (X3) + 0,6 (X4) + 0,999 (X5)$$

Dimana :

$$Z = \textit{Bankruptcy Index}$$

$$X1 = \textit{Working Capital / Total Asset}$$

$$X2 = \textit{Retained Earnings / Total Asset}$$

$$X3 = \textit{Earning Before Interest And Taxes / Total Asset}$$

$$X4 = \textit{Market Value Of Equity / Book Value Of Total Debt}$$

$$X5 = \textit{Sales / Total Asset.}$$

2. Model Altman Revisi

Pada tahun 1983, Altman mengembangkan model revisi dari model *Z-Score* sebelumnya. Perbedaan utama antara model pertama dengan model revisi terletak pada variabel X4 dalam persamaan *Z-Score*. Dalam model revisi, Altman mengganti pembilang *Market Value of Equity* pada variabel X4 menjadi *Book Value of Equity*, karena perusahaan privat tidak memiliki harga pasar untuk ekuitasnya. Perubahan ini dilakukan agar model prediksi kebangkrutan tidak hanya dapat

digunakan untuk perusahaan manufaktur yang *go public*, tetapi juga dapat diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan sektor swasta. Persamaan yang dipakai dalam analisis prediksi kebangkrutan model altman revisi adalah:

$$Z' = 0,717 (X1) + 0,847 (X2) + 3,108 (X3) + 0,42 (X4) + 0,988 (X5)$$

Dimana :

$Z' = \text{Bankruptcy Index}$

$X1 = \text{Working Capital} / \text{Total Asset}$

$X2 = \text{Retained Earnings} / \text{Total Asset}$

$X3 = \text{Earning Before Interest And Taxes} / \text{Total Asset}$

$X4 = \text{Book Value Of Equity} / \text{Book Value Of Total Debt}$

$X5 = \text{Sales} / \text{Total Asset}$.

3. Model Altman Modifikasi

Pada tahun 1995, Altman kembali memodifikasi dan menyempurnakan model *Z-Score* agar dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur, non-manufaktur, serta penerbit obligasi, baik yang berstatus privat maupun *go public*. Dalam pengembangannya, Altman mengeliminasi variabel $X5$ (*Sales/Total Assets*), karena rasio tersebut cenderung sangat bervariasi antar industri, terutama pada perusahaan dengan ukuran aset yang berbeda-beda.

Pada penelitian ini *financial distress* dihitung menggunakan model Altman modifikasi karena dianggap paling cocok untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan di Indonesia. Model ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan model Altman *Z-Score* lainnya dan dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan (Kusumayuda *et al.*, 2022).

Menurut Prihadi (2019) *financial distress* dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$Z'' = 6,56 (X1) + 3,26 (X2) + 6,72 (X3) + 1,05 (X4)$$

Dimana :

Z'' = *Bankruptcy Index*

$X1$ = *Working capital to total assets*

$X2$ = *Retained earning to total assets*

$X3$ = *Earning before interest and taxes to total assets*

$X4$ = *Book value of equity to book value of debt*

Menurut Juliyan & Kusrina (2018) variabel yang digunakan dalam analisis diskriminan model altman versi modifikasi yaitu sebagai berikut :

1. *Working Capital to Total Assets* (WCTA)

Working Capital To Total Assets atau rasio modal kerja terhadap total aset, digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan modal kerja bersih dari seluruh asetnya. Angka ini didapatkan dengan membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aset lancar dikurangi utang lancar. Rasio modal kerja menunjukkan seberapa sehat finansial suatu perusahaan. Jika rasio ini rendah atau negatif, perusahaan berisiko kesulitan membayar utang dan menjalankan bisnisnya. Sebaliknya, jika rasio ini tinggi atau positif mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Formula untuk menghitung *working capital to total assets* adalah

$$\text{WCTA} = \frac{(\text{Aktiva lancar} - \text{Hutang lancar})}{\text{total aktiva}}$$

2. *Retained Earning to Total Assets (RETA)*

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba ditahan dari total aset yang dimilikinya. Laba ditahan adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, melainkan disimpan untuk investasi atau keperluan perusahaan lainnya. Formula untuk menghitung *retained earning to total assets* adalah

$$\text{RETA} = \frac{\text{Laba yang ditahan}}{\text{Total aktiva}}$$

3. *Earning Before Interest and Taxes to Total Assets*

Digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari seluruh aset yang dimilikinya sebelum dibebani biaya bunga dan pajak. Formula untuk menghitung *earning before interest and taxes to total assets* adalah

$$\text{EBITTA} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

4. *Book Value of Equity to Book Value of Debt*

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dari hutang. Formula untuk menghitung *book value of equity to book value of debt* adalah

$$\frac{\text{Nilai buku ekuitas}}{\text{Nilai buku utang}}$$

Menurut Prihadi (2019) mengklasifikasikan perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai *Z-Score* model Altman Modifikasi yaitu:

- 1) Jika nilai $Z < 1,1$ maka termasuk perusahaan yang mengalami *financial distress*.
- 2) Jika nilai $1,1 < Z < 2,6$ maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami *financial distress*).
- 3) Jika nilai $Z > 2,6$ maka termasuk perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Kepemilikan Manajerial terhadap Risiko *Financial Distress*

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana pihak manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan dan sekaligus memiliki tanggung jawab sebagai pemegang saham. Struktur kepemilikan ini menciptakan insentif yang kuat bagi manajemen untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, mengingat bahwa keberhasilan perusahaan akan secara langsung berdampak pada nilai investasi mereka (Nasiroh & Priyadi, 2018). Kepemilikan saham oleh manajer bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi mengarah pada kesulitan *financial* perusahaan (Siregar & Pembudi, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian Savitri & Nursiam, (2024) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Lubis *et al* (2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.2.2. Kepemilikan Institusional terhadap Terhadap Risiko *Financial Distress*

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh entitas institusi lain baik itu perusahaan atau lembaga termasuk institusi pemerintah, swasta, domestik, maupun asing (Suparlan, 2019). Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dan mendorong manajemen untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, risiko perusahaan mengalami kesulitan keuangan dapat diminimalkan (Santoso *et al.*, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Mardahlia & Ghozali, (2023) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh Budiningsih *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.2.3. Tingkat Likuiditas terhadap Risiko *Financial Distress*

Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Fania & Erinos, 2023). Dalam penelitian ini tingkat likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*) sebagai tolok ukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset yang mudah dijual (Feanie & Dillak, 2021). Perusahaan dengan rasio lancar yang tinggi cenderung lebih stabil dan memiliki risiko keuangan yang lebih rendah (Dewi *et al.*, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Adzroo & Suryaningrum, (2023) yang menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Pratiwi & Amanah, (2023) yang menyatakan likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.3. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Dhea Zatira, Dede sunaryo, Ni made dewi dwicandra	Pengaruh likuiditas dan implementasi <i>good corporate governance (gcg)</i> terhadap <i>financial distress</i> . <i>Balance Vocation Accounting Journal</i> , Volume 6, Nomor 2, Tahun 2023	Variabel dependen : • <i>financial distress</i> Variabel independen : 1. Likuiditas 2. kepemilikan manajerial 3. kepemilikan institusional Alat analisis : Analisis regresi data panel Hasil penelitian : 1. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i> 2. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional	Keduanya sama-sama membahas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas	Perbedaannya terletak pada perusahaan, periode, alat analisis dan variabel

			tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>		
2	Yiyin Nasiroh dan Maswar Patuh Priyad	<p>Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial distress</i>.</p> <p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 7, Nomor 9, Tahun 2018</p>	<p>Variabel dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial distress</i> <p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional 2. Kepemilikan manajerial 3. Dewan direksi 4. Dewan komisaris 5. Komite audit <p>Alat analisis : Analisis regresi logistik</p> <p>Hasil penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> 	Keduanya sama-sama membahas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit	Perbedaannya terletak pada perusahaan, periode, alat analisis dan variabel

			<p>3. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i></p> <p>4. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.</p> <p>5. Komite audit berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i>.</p>		
3	Fildan Khairuddin, Abdul Wahid Mahsuni, dan Afifudin	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Rasio Likuiditas terhadap <i>Financial Distress</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2015-2018.</p> <p>E-JRA, Volume 08, Nomor 01, Tahun 2019</p>	<p>Variabel dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>financial distress</i> <p>Variabel independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan direksi 2. Proporsi dewan Komisaris independen 3. Kepemilikan manajerial 4. Kepemilikan institusional 5. Rasio likuiditas. <p>Alat analisis : Regresi linier berganda</p>	Keduanya sama-sama menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan membahas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas	Perbedaannya terletak pada perusahaan, periode dan variabel

			<p>Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dewan direksi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>financial distress</i>2. Proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>3. Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>4. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i>5. Rasio likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i>.6. Dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan		
--	--	--	---	--	--

			rasio likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> .		
4	Cintika Putri Muafiroh, Taofik Hidajat	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Financial Ratios</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> Perusahaan Perbankan ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen) Volume 10, Nomor 1, Tahun 2023	Variabel dependen : 1. <i>Financial distress</i> Variabel independen 1. Kepemilikan institusional 2. Kepemilikan manajerial 3. Dewan direksi 4. Dewan komisaris 5. Komisaris independen 6. Likuiditas 7. Profitabilitas Alat analisis : Analisis regresi berganda Hasil penelitian : 1. <i>Good Corporate Governance</i> yang diukur melalui kepemilikan institusional,	Keduanya sama-sama menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan membahas kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas	Perbedaannya terletak pada perusahaan, periode dan variabel

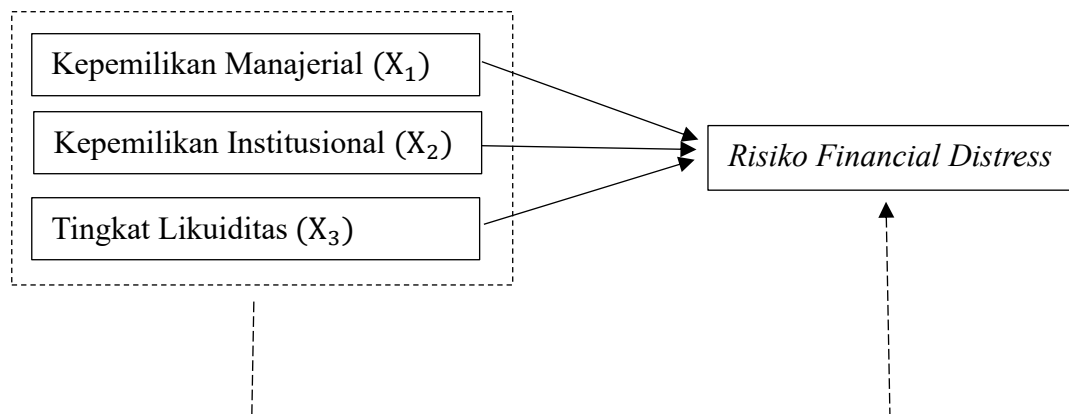
			<p>kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap terjadinya <i>financial distress</i> pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.</p> <p>2. <i>Financial Ratios</i> yang diukur melalui rasio likuiditas dan rasio profitabilitas berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.</p>		
5	Bernadin Arum Sekar Budiningsih, Agustinus Tri Kristanto, Gien Agustinawansari	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Kemungkinan Terjadinya <i>Financial Distress</i>	<p>Variabel dependen :</p> <p>1. <i>financial distress</i></p> <p>Variabel independen :</p> <p>1. Kepemilikan manajerial 2. Kepemilikan institusional 3. Komisaris Independen</p>	Keduanya sama-sama membahas kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional	Perbedaannya terletak pada perusahaan, periode, alat analisis dan variabel

		<p><i>Journal of Research in Business and Economics</i> Volume 04, Nomor 01 Tahun 2021.</p>	<p>4. Ukuran dewan direksi 5. Ahli keuangan dalam komite audit</p> <p>Alat analisis : Analisis regresi logistik</p> <p>Hasil penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan direksi dan ahli keuangan dalam komite audit tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i> 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kemungkinan terjadinya <i>financial distress</i>. 		
--	--	---	---	--	--

2.4. Kerangka Pemikiran

Sugiyono (2016:60) Menyatakan bahwa kerangka pemikiran adalah struktur konseptual yang menyatukan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian dan menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut saling berhubungan. kerangka ini berfungsi untuk menggambarkan pola hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diteliti.

Dalam konteks ini, kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara beberapa variabel independen, seperti kepemilikan manajerial (X_1), kepemilikan institusional (X_2) dan tingkat likuiditas (X_3), terhadap variabel dependen yaitu *financial distress* (Y).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- ▶ : Parsial
- - - - -▶ : Simultan

2.5. Hipotesis

Menurut Abdullah *et al.*, (2022:49) hipotesis merupakan pernyataan yang diajukan sebagai dugaan awal atas hubungan antara variabel-variabel penelitian yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut dengan pengolahan data. Berdasarkan kerangka pemikiran dan berbagai penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian adalah

X₁ : Diduga ada pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap risiko *financial distress* pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023

X₂ : Diduga ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap risiko *financial distres* pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023

X₃ : Diduga ada pengaruh tingkat likuiditas terhadap risiko *financial distress* pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023

X₄ : Diduga ada pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan tingkat likuiditas terhadap risiko *financial distress* pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023